

Jokowi: Jaga Stok untuk Hindari Krisis Pangan

Oleh Novy Lumanauw

► **JAKARTA**- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajaran menteri dan pemerintah daerah (pemda) untuk mencermati dan mewaspadaai peringatan Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) tentang potensi kelangkaan atau bahkan krisis pangan dunia akibat pandemi virus corona baru (Covid-19).

Khusus menteri terkait pangan diminta untuk menjaga stok atau ketersediaan dengan meningkatkan produksi dan memperbaiki distribusi sehingga tidak ada gangguan pada rantai pasok pangan nasional. Demikian salah satu arahan yang disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas mengenai Laporan Tim Gugus Tugas Covid-19 yang dilakukan melalui konferensi video di Jakarta, Senin (13/4). Jokowi juga memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengingatkan setiap kepala daerah di Indonesia agar mampu menjaga ketersediaan bahan pokok. "Peringatan dari FAO agar betul-betul kita perhatikan, kita garis bawahi mengenai peringatan bahwa pandemi Covid-19 ini bisa berdampak pada kelangkaan pangan dunia atau krisis pangan dunia," jelas Kepala Negara.

Setiap kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun walikota, kata

Presiden, perlu memperhitungkan kebutuhan pangan setiap daerah hingga beberapa waktu ke depan. Dengan begitu, kelangkaan bahan pokok bisa dihindari dan tidak terjadi kenaikan harga secara drastis. "Mungkin panen (padi) saat ini baik, lalu panen dari penanaman untuk periode Agustus-September betul-betul dilihat secara detail sehingga tidak mengganggu produksi rantai pasok maupun distribusi bahan makanan yang ada," kata Presiden.

Merujuk pada situs resmi FAO, tekanan akibat Covid-19 dalam rantai pasokan bahan pangan masih minim. Namun, terdapat tantangan ke depannya dalam alur logistik. Hal ini juga karena distribusi bahan makanan perlu berjalan tanpa batasan dan sesuai dengan standar keamanan pangan yang ada. Untuk mengurangi dampak pandemi pada pangan dan pertanian maka FAO meminta negara-negara di dunia untuk memenuhi kebutuhan

pangan dari populasi rentan. Kemudian negara-negara di dunia juga perlu meningkatkan program perlindungan sosial, menjaga perdagangan pangan global terus berjalan, menjaga rantai pasokan domestik tetap bergerak, dan mendukung kemampuan petani kecil untuk meningkatkan produksi pangan.

Sedangkan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo mengatakan, pemerintah menjamin ketersediaan bahan pangan mencukupi hingga 3-4 bulan ke depan. "Menteri Pertanian (Syahrul Yasin Limpo) menyampaikan kecukupan pangan selama 3-4 bulan ke depan. *Alhamdulillah* aman," kata Doni. Doni juga mengatakan, saat ini beberapa harga bahan pangan sudah terkendali setelah sebelumnya sempat mengalami kenaikan.

Dalam rapat tersebut, Doni mengatakan, Presiden Jokowi juga menekankan kepada jajaran menteri tentang pentingnya upaya antisipasi kelangkaan dan krisis pangan dunia seperti disampaikan FAO karena situasi pandemi global Covid-19. Kepala Negara memerintahkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo meningkatkan ketahanan pangan nasional dan menghilangkan ketergantungan impor. "Beberapa negara yang memberikan kebutuhan pangan kita, mungkin ke depan tidak bisa memenuhi," kata Doni.

Cukup Sampai Agustus

Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebelumnya telah memastikan bahwa ketersediaan 11 bahan pangan pokok yang merupakan kebutuhan dasar



Produksi Gabah Nasional Diprediksi Turun

Petani menjemur gabah di Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (13/4/2020). Dirut PT Perkebunan Nusantara mengatakan panen pada masa tanam pertama (MT 1) pada April ini diperkirakan turun hingga 50 persen dikarenakan keterlambatan musim tanam serta iklim dan cuaca yang kurang mendukung.

masyarakat saat ini dalam posisi mencukupi, setidaknya hingga Agustus 2020. Kepastian pasokan ke-11 pangan pokok tersebut sangat krusial di tengah pandemi Covid-19 dan menjelang Pua-sa-Lebaran. "Kementan diberi tanggung jawab memastikan ketersediaan 11 bahan pokok kebutuhan dasar. Presiden minta negara bisa hadir dan memastikan dengan baik. Kami memastikan stok ke-11 bahan pangan pokok tersebut

cukup sampai Agustus 2020," ujar SYL. Ke-11 bahan pangan pokok yang dikawal Kementan di antaranya beras, jagung, gula, minyak goreng, daging, telur, bawang, dan cabai. Saat ini, pemerintah memiliki data perkiraan pasokan ketersediaan pangan strategis nasional untuk Maret-Agustus 2020, rinciannya untuk ketersediaan beras misalnya mencapai 25.653.591 ton dengan kebutuhan 15.099.846 ton. Lalu,

ketersediaan jagung 13.741.071 ton dengan kebutuhan 9.096.555 ton, ketersediaan bawang merah 1.060.857 ton dengan kebutuhan 701.482 ton, cabai besar 657.467 ton dengan kebutuhan 551.261 ton, daging ayam ras 2.063.086 ton dengan kebutuhan 1.737.216 ton, dan minyak goreng 23.392.557 ton dengan kebutuhan 4.419.180 ton. Untuk gula, ketersediaan mencapai 1 juta ton hingga Juni tahun ini. (t)

CIMB NIAGA

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK CIMB NIAGA Tbk

PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari Kamis, 9 April 2020 pukul 14:17 WIB s.d 15:32 WIB, bertempat di Lantai 15, Lantai 14, dan Lantai M, Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan 12190.

Sehubungan dengan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan keterbukaan sebagai berikut:

- Pembentahan rencana Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa"), masing-masing pada tanggal 18 Februari 2020;
- Iklan pengumuman rencana penyelenggaraan Rapat pada tanggal 25 Februari 2020 di surat kabar Investor Daily dan The Jakarta Post serta mengunggahnya ke situs web Perseroan: www.cimbniaga.co.id ("Situs Web Perseroan") dan situs web Bursa melalui laporan elektronik di www.idx.co.id ("Situs Web Bursa") pada tanggal yang sama;
- Iklan panggilan untuk menghadiri Rapat, pada tanggal 11 Maret 2020 di surat kabar Investor Daily dan The Jakarta Post (28 hari sebelum pelaksanaan Rapat), serta mengunggahnya ke Situs Web Perseroan dan Situs Web Bursa pada tanggal yang sama;
- Ralat atas iklan panggilan, pada tanggal 13 Maret 2020 di surat kabar Investor Daily dan The Jakarta Post, serta mengunggahnya ke Situs Web Perseroan dan Situs Web Bursa pada tanggal yang sama;
- Perubahan atas Iklan Panggilan pada tanggal 1 April 2020 di surat kabar Investor Daily dan The Jakarta Post, serta mengunggahnya ke Situs Web Perseroan dan Situs Web Bursa pada tanggal yang sama;
- Mengunggah Laporan Tahunan 2019 Perseroan ke Situs Web Perseroan dan Situs Web Bursa pada tanggal 11 Maret 2020; dan
- Mengunggah Penjelasan Seluruh Agenda Rapat, Publikasi Laporan Keuangan Tahunan 2019, Laporan Keberlanjutan 2019, Daftar Riwayat Hidup Akuntan Publik dan Profil Kantor Akuntan Publik yang disusulkan, Daftar Riwayat Hidup calon anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi dan calon anggota Komite Audit Perseroan yang diajukan untuk diangkat maupun diangkat kembali (sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan dan/atau masa tugas pada penutupan Rapat), Ringkasan Rencana Aksi ("Recovery Plan"), Rancangan Perubahan Anggaran Dasar, Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan ("RAKB") 2020 – 2024, Video Ilustrasi Tata Cara Pemungutan Suara Secara Elektronik (E-Voting), Tata Tertib Rapat, Formulir Surat Kuasa pada Situs Web Perseroan, pada tanggal 11 Maret 2020.

Sesuai dengan Pasal 12 ayat 12.3 Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan No. 005/DIR/DEKOM/III/2020 tanggal 10 Maret 2020, Rapat dipimpin oleh JEFFREY KAIRUPAN selaku Komisaris Independen (Senior) Perseroan.

Seluruh anggota Dewan KOMISARIS (kecuali TENGGU DATO' SRI ZAFRUL TENGGU ABDUL AZIS, Presiden Komisaris, yang telah mengundurkan diri tanggal 9 Maret 2020), anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan anggota Komite Audit yang hadir dalam Rapat, baik secara fisik maupun melalui media konferensi video, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Direksi	Dewan Pengawas Syariah	Komite Audit
1. GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF, Wakil Presiden Komisaris	1. TIGOR M. SIAHAAN, Presiden Direktur	1. PROF. DR. M. QURAIISH SHIHAB, MA, Ketua	1. JEFFREY KAIRUPAN, Ketua (merangkap sebagai Anggota)
2. ZULKIFLI M. ALI, Komisaris Independen	2. RITA MAS'ODEI, Direktur	2. MEGAWATI SUTANTO, Direktur	2. ZULKIFLI M. ALI, Anggota
3. PRI NOTOWIDIGDO, Komisaris Independen	4. VERA HANDAJANI, Direktur	4. JOHN SIMON, Direktur	
4. JEFFREY KAIRUPAN, Komisaris Independen	5. JOHN SIMON, Direktur	5. LANI DARMAWAN, Direktur	
5. DAVID RICHARD THOMAS, Komisaris	6. LANI DARMAWAN, Direktur	6. PANJDI P. DJAJANEgara, Direktur	
6. DIDI SYAFRUDDIN YAHYA, Komisaris	7. PANJDI P. DJAJANEgara, Direktur	7. HEDY LAPIAN, Direktur	
7. SRI WIDOWATI, Komisaris Independen	8. HEDY LAPIAN, Direktur	8. RAHARDJA ALIMHAMZAH, Direktur	
	9. RAHARDJA ALIMHAMZAH, Direktur	9. FRANSISKA OEI, Direktur merangkap Direktur Kepatuhan	
	10. FRANSISKA OEI, Direktur merangkap Direktur Kepatuhan	11. LEE KAI KWONG, Direktur	

Perseroan dalam hal ini telah: (i) menunjuk Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., selaku Notaris Publik serta PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek (keduanya pihak independen) untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara dalam Rapat; dan (ii) memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat atas setiap agenda Rapat, namun tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat dalam Rapat. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voiting*). Pemungutan suara dilakukan pada: (i) setiap agenda Rapat, (ii) terhadap masing-masing calon anggota Dewan Komisaris yang diajukan untuk diangkat maupun diangkat kembali sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan, dan (iii) masing-masing anggota Direksi yang diajukan untuk diangkat maupun diangkat kembali sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan. Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan secara individual dan elektronik (*e-voting*) melalui *Telepon Cerdas (Smartphone)* atau *Mobile Device* lainnya (*tablet*, dan lain-lain), juga melalui *Monitor Layar Sentuh* yang telah disediakan Perseroan, sehingga suara Pemegang Saham dapat terjaga kerahasiannya.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 10 Maret 2020, jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Perseroan dengan hak suara yang sah sebanyak 24.933.620.041 saham (tidak termasuk saham dalam treasury sebanyak 197.986.802 saham). Jumlah saham dengan hak suara yang sah untuk hadir atau diwakili dalam Rapat (baik saham Kelas A maupun saham Kelas B) keduanya mempunyai hak yang sama) adalah 23.940.283.849 saham atau kurang lebih 96,0161% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan (tanpa memperhitungkan saham dalam treasury). Dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum pengambilan keputusan untuk agenda Rapat (yaitu lebih dari 1/2 bagian dan khusus untuk agenda ke 7 lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Perseroan dengan hak suara yang sah). Oleh karenanya, Rapat sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan sebagai berikut:

- Agenda Pertama**
- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
 - Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota PricewaterhouseCoopers Global di Indonesia) sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 17 Februari 2020 dengan opini bahwa "Laporan Keuangan Konsolidasi menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasi PT Bank CIMB Niaga Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia";
 - Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019; dan
 - Memberikan pembasahan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*voided acquit et déchargé*") kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS Perseroan (termasuk anggota Dewan Komisaris yang telah mengundurkan diri pada tahun 2019) atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2019, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercinan dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.

Hasil perhitungan suara	Total Suara Mayoritas: 23.938.324.049 saham atau 99,9918% (Setuju)	Tidak Setuju	Blanko/Tidak Memberikan Suara*
Agenda Pertama	23.938.178.198 saham atau 99,9912%	1.959.800 saham atau 0,0082%	145.851 saham atau 0,006%

- Agenda Kedua**
- Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2019 yang seluruhnya sebesar Rp3.480.403.347.581, dengan rincian sebagai berikut:
- Dibagikan sebagai dividen tunai setinggi-tingginya 40% dari laba bersih Perseroan atau sebesar-besarnya Rp1.392.161.339.032 (gross) dengan jadwal sebagai berikut:
 - Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi 17 April 2020
 - Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi 20 April 2020
 - Cum Dividen di Pasar Tunai 22 April 2020
 - Recording *date* pemegang saham yang berhak 22 April 2020
 - Ex Dividen di Pasar Tunai 23 April 2020
 - Pembayaran Dividen Tahun Buku 2019
 - dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan tata cara pembagian dividen tunai tersebut dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal.
- Perseroan tidak menyetujui hal lain yang berkaitan dengan, mengingat persyaratan minimum cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPU telah terpenuhi;
- Membubarkan sisa laba bersih Perseroan tahun buku 2019, setelah dikurangi pembagian dividen, sebagai laba ditahan sebesar Rp2.088.242.008.548 untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.

Hasil perhitungan suara	Total Suara Mayoritas: 23.940.283.849 saham atau 100% (Setuju)	Tidak Setuju	Blanko/Tidak Memberikan Suara*
Agenda Kedua	23.940.137.998 saham atau 99,9994%	0 saham atau 0%	145.851 saham atau 0,006%

- Agenda Ketiga**
- Menyetujui penunjukan Irhoan Tanudiredja, dan Kantor Akuntan Publik "Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan" (firma anggota PricewaterhouseCoopers Global di Indonesia) masing-masing sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") atau Akuntan Publik lain dalam Kantor Akuntan Publik yang sama dalam hal yang bersangkutan bertanggung jawab untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.
 - Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain, apabila terdapat keberatan dari OJK atau penunjukan Kantor Akuntan Publik "Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan" atau Kantor Akuntan Publik tersebut melakukan restrukturisasi *partnership* sehingga menjadi Kantor Akuntan Publik yang berbeda.
- Atas pelimpahan kewenangan tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut:
- Kantor Akuntan Publik lain yang ditunjuk Dewan Komisaris tersebut harus merupakan salah satu dari kelompok empat besar (*the Big Four*) Kantor Akuntan Publik di Indonesia;
 - Penunjukan tersebut harus berdasarkan rekomendasi Komite Audit Perseroan;
 - Besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik lain tersebut harus ditetapkan secara bersaing dan wajar; dan
 - Penunjukan Kantor Akuntan Publik lain tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menyetujui usulan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik untuk biaya audit tahunan Perseroan tahun buku 2020 sebesar-besarnya Rp7.800.000.000 (gross - tidak termasuk PPN dan OPEK).
 - Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik termasuk akan tetapi tidak terbatas pada proses pelaksanaan rapat dan penandatanganan surat penunjukan bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.

Hasil perhitungan suara	Total Suara Mayoritas: 23.940.283.849 saham atau 100% (Setuju)	Tidak Setuju	Blanko/Tidak Memberikan Suara*
Agenda Ketiga	23.940.137.998 saham atau 99,9994%	0 saham atau 0%	145.851 saham atau 0,006%

- Agenda Keempat**
- Menerima permohonan pengunduran diri nama-nama sebagai berikut:
 - GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF dari jabatannya selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan efektif tanggal 1 September 2019.
 - RAHARDJA ALIMHAMZAH dari jabatannya selaku Direktur Perseroan efektif tanggal 9 April 2020 atau sejak ditunjuknya Rapat; dan
 - TENGGU DATO' SRI ZAFRUL TENGGU ABDUL AZIZ dari jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan efektif tanggal 9 Maret 2020.
 - Mengangkat kembali JEFFREY KAIRUPAN selaku Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan yang ke-4 (keempat) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UUPU.
 - Mengangkat kembali VERA HANDAJANI selaku Direktur Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-4 (keempat) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPU.
 - Mengangkat kembali LANI DARMAWAN selaku Direktur Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-4 (keempat) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPU.
 - Mengangkat kembali PANJDI P. DJAJANEGERA selaku Direktur Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-4 (keempat) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPU.
 - Memberhentikan dengan hormat DIDI SYAFRUDDIN YAHYA dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dan pada saat yang bersamaan mengangkat beliau selaku Presiden Komisaris Perseroan.
- Pengangkatan tersebut dengan masa jabatan efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari OJK tersebut ("tanggap efektif") sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-4 (keempat) setelah tanggal efektif pengangkatan beliau selaku Komisaris Perseroan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UUPU.
- Dalam hal OJK tidak menyetujui pengangkatan atau persyaratan yang ditetapkan oleh OJK tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut menjadi batal dan tidak berlaku tanpa diperlakukan persetujuan RUPS, dan oleh karenanya jabatan yang bersangkutan tetap sebagai jabatan sebelumnya yakni Komisaris Perseroan.
- Mengangkat GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF selaku Wakil Presiden Komisaris (Independen) Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditunjuknya Rapat dan setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari OJK tersebut ("tanggap efektif") sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-4 (keempat) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UUPU.
 - Dalam hal OJK tidak menyetujui pengangkatan atau persyaratan yang ditetapkan oleh OJK tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut menjadi batal dan tidak berlaku tanpa diperlakukan persetujuan RUPS.

- Mengangkat TJIOE MEI TIJUN selaku Direktur Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditunjuknya Rapat dan setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari OJK tersebut ("tanggap efektif") sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-4 (keempat) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPU.
- Dalam hal OJK tidak menyetujui pengangkatan atau persyaratan yang ditetapkan oleh OJK tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut menjadi batal dan tidak berlaku tanpa diperlakukan persetujuan RUPS.

Dengan adanya pengunduran diri, pengangkatan kembali dan pengangkatan tersebut maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi:

DEWAN KOMISARIS	DIREKSI	TIGOR M. SIAHAAN
Presiden Komisaris	Presiden Direktur	LEE KAI KWONG
Wakil Presiden Komisaris (Independen)	Direktur	JOHN SIMON
Komisaris	Direktur	VERA HANDAJANI
Komisaris Independen	Direktur	LANI DARMAWAN
Komisaris Independen	Direktur	PANJDI P. DJAJANEGERA
	Direktur merangkap Direktur Kepatuhan	FRANSISKA OEI
	Direktur	TJIOE MEI TIJUN*

*) Efektif setelah mendapat persetujuan OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam persetujuan OJK dimaksud.

- Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam akta notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Hasil perhitungan suara	Total Suara Mayoritas: 23.930.810.239 saham atau 99,9604% (Setuju)	Tidak Setuju	Blanko/Tidak Memberikan Suara*
Pengangkatan kembali JEFFREY KAIRUPAN sebagai Komisaris Independen Perseroan	23.930.664.388 saham atau 99,9598%	9.473.610 saham atau 0,0396%	145.851 saham atau 0,006%
Hasil perhitungan suara	Total Suara Mayoritas: 23.937.566.949 saham atau 99,9887% (Setuju)	Tidak Setuju	Blanko/Tidak Memberikan Suara*
Agenda Keempat	23.937.421.098 saham atau 99,9880%	2.716.900 saham atau 0,0113%	145.851 saham atau 0,006%
Pengangkatan kembali VERA HANDAJANI sebagai Direktur Perseroan	23.937.421.098 saham atau 99,9880%	2.716.900 saham atau 0,0113%	145.851 saham atau 0,006%
Hasil perhitungan suara	Total Suara Mayoritas: 23.937.566.949 saham atau 99,9887% (Setuju)	Tidak Setuju	Blanko/Tidak Memberikan Suara*
Agenda Keempat	23.937.421.098 saham atau 99,9880%	2.716.900 saham atau 0,0113%	145.851 saham atau 0,006%
Pengangkatan kembali LANI DARMAWAN sebagai Direktur Perseroan	23.937.421.098 saham atau 99,9880%	2.716.900 saham atau 0,0113%	145.851 saham atau 0,006%
Hasil perhitungan suara	Total Suara Mayoritas: 23.937.566.949 saham atau 99,9887% (Setuju)	Tidak Setuju	Blanko/Tidak Memberikan Suara*
Agenda Keempat	23.937.421.098 saham atau 99,9880%	2.716.900 saham atau 0,0113%	145.851 saham atau 0,006%
Pengangkatan kembali PANJDI P. DJAJANEGERA sebagai Direktur Perseroan	23.937.421.098 saham atau 99,9880%	2.716.900 saham atau 0,0113%	145.851 saham atau 0,006%
Hasil perhitungan suara	Total Suara Mayoritas: 23.937.566.949 saham atau 99,9887% (Setuju)	Tidak Setuju	Blanko/Tidak Memberikan Suara*
Agenda Keempat	23.937.421.098 saham atau 99,9880%	2.716.900 saham atau 0,0113%	145.851 saham atau 0,006%
Pengangkatan kembali FRANSISKA OEI sebagai Direktur merangkap Direktur Kepatuhan Perseroan	23.937.421.098 saham atau 99,9880%	2.716.900 saham atau 0,0113%	145.851 saham atau 0,006%
Hasil perhitungan suara	Total Suara Mayoritas: 23.930.810.239 saham atau 99,9604% (Setuju)	Tidak Setuju	Blanko/Tidak Memberikan Suara*
Agenda Keempat	23.930.664.388 saham atau 99,9598%	9.473.610 saham atau 0,0396%	145.851 saham atau 0,006%
Pengangkatan DIDI SYAFRUDDIN YAHYA sebagai Presiden Komisaris Perseroan	23.930.664.388 saham atau 99,9598%	9.473.610 saham atau 0,0396%	145.851 saham atau 0,006%
Hasil perhitungan suara	Total Suara Mayoritas: 23.930.810.239 saham atau 99,9604% (Setuju)	Tidak Setuju	Blanko/Tidak Memberikan Suara*
Agenda Keempat	23.930.664.388 saham atau 99,9598%	9.473.610 saham atau 0,0396%	145.851 saham atau 0,006%
Pengangkatan GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF sebagai Wakil Presiden Komisaris (Independen) Perseroan	23.930.664.388 saham atau 99,9598%	9.473.610 saham atau 0,0396%	145.851 saham atau 0,006%
Hasil perhitungan suara	Total Suara Mayoritas: 23.937.566.949 saham atau 99,9887% (Setuju)	Tidak Setuju	Blanko/Tidak Memberikan Suara*
Agenda Keempat	23.937.421.098 saham atau 99,9880%	2.716.900 saham atau 0,0113%	145.851 saham atau 0,006%

- Agenda Kelima**
- Menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2020 sebesar-besarnya Rp16.607.850.000 (gross) dan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
 - Menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi DPS Perseroan tahun buku 2020 sebesar-besarnya Rp1.807.666.190 (gross) dan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk masing-masing anggota DPS Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Dengan demikian seluruh anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan DPS tidak menerima tantiem/bonus.
 - Menyetujui jumlah tantiem/bonus untuk tahun buku 2019 yang akan dibayarkan tahun 2020 sebesar-besarnya Rp4.428.008.350 (gross) termasuk di dalamnya pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Perseroan, dan menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem/bonus masing-masing anggota Direksi Perseroan tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
 - Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, tunjangan hari raya dan tunjangan lain bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan tahun buku 2020, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Hasil perhitungan suara	Total Suara Mayoritas: 23.940.283.849 saham atau 100% (Setuju)	Tidak Setuju	Blanko/Tidak Memberikan Suara*
Agenda Kelima	23.940.137.998 saham atau 99,9994%	0 saham atau 0%	145.851 saham atau 0,006%

- Agenda Keenam**
- Menyetujui pengkajian Rencana Aksi ("Recovery Plan") yang telah disusun dan disampaikan Perseroan kepada OJK pada tanggal 29 November 2019, diantaranya memuat:
 - Penambahan pemenuhan kecukupan dan kelayakan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki oleh Bank Sistemik melalui penerbitan Obligasi Subordinasi I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019 yang telah dilakukan oleh Perseroan; dan
 - Perubahan *trigger* level dalam rangka kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku saat ini.
 - Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan tugas dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengkajian Rencana Aksi ("Recovery Plan") Perseroan dengan memperhatikan POJK tentang Rencana Aksi ("Recovery Plan") bagi Bank Sistemik dan peraturan terkait lainnya.

Hasil perhitungan suara	Total Suara Mayoritas: 23.940.283.849 saham atau 100% (Setuju)	Tidak Setuju	Blanko/Tidak Memberikan Suara*
Agenda Keenam	23.940.137.998 saham atau 99,9994%	0 saham atau 0%	145.851 saham atau 0,006%

- Agenda Ketujuh**
- Menyetujui perubahan beberapa ayat pada Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan;
 - Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, dalam akta notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil perhitungan suara	Total Suara Mayoritas: 23.940.283.849 saham atau 100% (Setuju)	Tidak Setuju	Blanko/Tidak Memberikan Suara*
Agenda Ketujuh	23.940.137.998 saham atau 99,9994%	0 saham atau 0%	145.851 saham atau 0,006%

Agenda Kedelapan

Lain-lain:

- Sesuai Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 dan laporan yang telah disampaikan kepada OJK Pasar Modal melalui surat No. 001/DIR/1/2020 tanggal 8 Januari 2020, dalam Rapat dilaporkan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum per 31 Desember 2019, bahwa dana yang diperoleh masing-masing Penawaran Umum:
 - Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019 sebesar Rp1.992.179.036.300 (net);
 - Obligasi Berkelanjutan III Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019 sebesar Rp1.813.966.957.805 (net); dan
 - Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019 sebesar Rp76.930.082.805 (net).
 telah sepenuhnya digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus masing-masing.
- Sesuai Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017, dalam Rapat dilaporkan